

Modal Sosial Kelembagaan Petani Karet di Kabupaten Kuantan Singingi

S Syofian^{1*}, S Sujianto, dan Tito Handoko

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293, Indonesia

²Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293, Indonesia

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293, Indonesia

Email: *syofian@lecturer.unri.ac.id; sujianto@lecturer.unri.ac.id;
tito.handhoko@lecturer.unri.ac.id

Naskah diterima: 2/5/2020; Revisi: 10/5/2020; Disetujui: 31/5/2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengembangan kelembagaan petani karet dalam penyelenggaraan modal sosial petani perkebunan karet. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, pengamatan, dan FGD. Validitas data dilakukan dengan triangulasi data atau sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kelembagaan petani perkebunan karet berbasis modal sosial mereka lakukan dengan upaya diri sendiri terbangun secara sukarela terwujud dalam bentuk modal budaya, modal manusia dan modal ekonomi. Jejaring sosial dan norma yang sudah ada masih belum kuat di samping mayoritas petani perkebunan karet karena dalam menjalankan fungsi organisasi belum berjalan secara optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa modal sosial menjadi kekuatan bagi petani perkebunan karet sampai hari ini masih bertahan. Penelitian dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya bahwa dalam kelembagaan petani modal sosial dapat dijadikan sebagai subjek atau objek penelitian bidang sosial.

Kata kunci: *institusional; modal sosial; petani karet*

Institutional Social Capital of Rubber Farmers in Kuantan Singingi Regency

Abstract

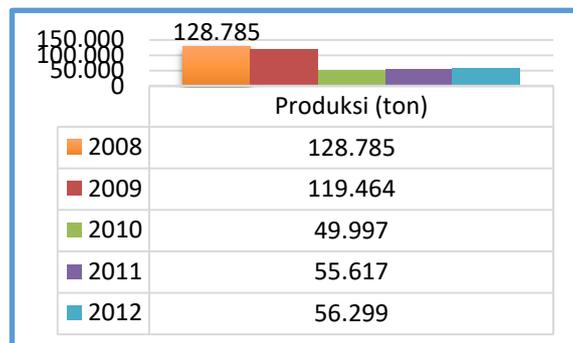
This research aims to know the efforts of institutional development of rubber farmers in the implementation of social capital of rubber plantation farmers. Methods used with qualitative methods, with data collection with interview techniques, observations, FGD. Data validity is done with the data or source triangulation. The results showed that the institutional development of rubber plantation farmers based their social capital to do with self-awakened efforts voluntarily manifested in the form of cultural capital, human capital and economic capital. Social networks and existing norms are still not strong alongside the majority of rubber plantation farmers because in carrying out the function of the organization has not run optimally. So it can be concluded that the social capital is a strength for rubber plantation farmers to this day still survive. Research can be a referral for the next researcher that in the institutional social capital farmers can be used as a subject or social field research object.

Keywords: *institutional; social Capital; rubber farmers*

Pendahuluan

Produksi karet di Provinsi Riau adalah salah satu yang terbesar di pulau Sumatera. Namun, pada periode 2008 hingga 2012, produksi karet di Provinsi Riau cenderung stagnan pada kisaran 325.000 ton hingga 396.000 ton dengan jumlah lahan yang digunakan mencapai 500.949 hektar. Di Provinsi Riau jika dilihat dari daerah pemanfaatan lahan, maka potensi pembangunan komoditas karet terbesar di Kabupaten Kuantan Singingi dengan penggunaan lahan seluas 146.215 hektar. Terbesar kedua adalah tanah dengan luas Kabupaten Kampar 101.597 hektar dan yang ketiga adalah Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas lahan 61.372 hektar yang digunakan. Secara kuantitatif, masalah yang berhubungan perkembangan Produksi karet petani di Kuantan Singingi muncul dalam bentuk tidak relatif-dan jumlah berfluktuasi produksi karet-tahun 2008 untuk 2012. Grafik 1. menunjukkan bahwa produksi karet di Kuantan Singingi sangat drastis penurunan terutama pada periode 2009 untuk 2010. Pada periode berikutnya memang terjadi peningkatan jumlah produksi, tetapi tidak dalam jumlah yang signifikan.

Kondisi ini berlanjut sampai akhir tahun 2012 hingga sekarang. Produktivitas komoditas karet di Kuantan Singingi mengalami stagnasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, produktivitas perkebunan karet stagnan kontra produktif dengan skenario pengembangan makro yang telah dikompilasi baik tingkat pusat maupun wilayah. dalam percepatan kebijakan masterplan pembangunan ekonomi di Indonesia (MP3EI) secara eksplisit menyebutkan perlunya percepatan pembangunan ekonomi di Sumatera melalui pengembangan industri karet. Ini adalah output yang lebih rendah untuk komoditas karet yang terbangun dalam industri karet yang akhirnya akan membawa multi efek bagi daerah, terutama perekonomian masyarakat.



Sumber: BPS Provinsi Riau 2013

Grafik 1. Produksi Karet Kabupaten Kuantan Singingi

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan adanya kebijakan merevitalisasi komoditas karet di Kuantan Singingi yang semakin meningkat yang menjadi kekhawatiran masyarakat pengelola perkebunan karet, dan akhirnya pindah ke pengelolaan kelapa sawit yang dinilai lebih menguntungkan dalam jangka pendek atau menengah. Hal ini menunjukkan penurunan laju tarikan dan dorongan faktor pengembangan komoditi karet di Kuantan Singingi sehingga perlu segera mencari solusi solusinya. Penelitian ini fokus kepada aspek sumber daya manusia sebagai entri pointnya. Karena ada sekitar 62.975 orang petani karet "masih bertahan" pada komoditas karet. Angka tersebut dibagi menurut pola pengelolaan karet Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu: a) Pola Swadaya sebanyak 32.320 Petani; b) Pola Bantuan PKTR sebanyak 14.701 Petani; c) Pola UPP/PEK/SRDP sebanyak 15.192 Petani; d) Pola PEAR/KKPA sebanyak 762 Orang; e) Pola PD (belum/belum dikelola petani).

Sebagai sebuah modal dasar, aspek sumberdaya manusia dalam pengelolaan komoditi karet di Kabupaten Kuantan Singingi terkonsentrasi pada pola pengelolaan yang swadaya. Pola swadaya cenderung memposisikan petani sebagai subordinat, misalnya dalam hal harga jual

karet. Sementara keempat pola yang lainnya lebih memiliki bargain sekaligus bargainig power dalam konteks pengelolaan komoditi karet, karena mereka menggerakkan usahanya dengan cara-cara yang lebih manajerial dan sistematis jika dibandingkan dengan pola swadaya. Misalnya saja dengan adanya kesadaran untuk membentuk sebuah kelembagaan. Data terakhir menunjukkan bahwa dari 62.975 orang petani yang ada, baru terbentuk 35 kelembagaan usaha perkebunan karet dengan jumlah anggota seluruhnya sekitar 1.012 orang, sehingga masih sangat banyak petani-petani pengelola perkebunan karet yang sampai dengan saat ini belum dikembangkan dan/atau diberdayakan sesuai dengan kekuatan mereka.

Pengembangan kelompok-kelompok sosial-ekonomi berskala kecil dan menengah di perkebunan karet perlu menjadi sasaran utama dalam kegiatan pembangunan yang berbasis komunitas. Pengembangan masyarakat semacam ini pada gilirannya akan memberikan peluang pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan usaha-usaha produktif lainnya (Nasdian, 2014). Lebih lanjut (Nasdian, 2014) mengemukakan bahwa pengembangan kelembagaan menjadi sangat penting dalam pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif karena sampai sejauh ini pengembangan tersebut memerlukan transaction cost yang tinggi. Selain itu, melalui pengembangan kelembagaan, khususnya lembaga adat, ternyata mampu mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan, misalnya keterlantaran anak dan kemiskinan (Hikmat, 2006).

Pengembangan kelembagaan petani perkebunan karet merefleksikan sejauh mana jejaring sosial telah terbangun dalam komunitas masyarakat tersebut. Kedua aspek ini (kelembagaan dan jejaring sosial) jika disinergiskan dengan fungsi-fungsi dari berbagai *stakeholder* usaha perkebunan karet, akan mengejawantah menjadi pengembangan modal sosial (*social capital*). Menurut (Putnam, 1995) ada tiga unsur modal sosial dalam kehidupan masyarakat yaitu *trust*, *institutions*, dan *social Networking*. Lebih lanjut (Sujianto et al., 2018) mengemukakan bahwa modal sosial ini dapat memberikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam sisi ekonomi maupun sosial melalui jaringan-jaringan sosial yang sudah ada.

Kelembagaan dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipungkiri lagi terbentuk karena terkait dorongan unsur modal sosial yang terdiri dari; trust, jaringan sosial, dan pranata sosial (Atmadja et al., 2016). Sehingga pengembangan masyarakat yang berbasis modal sosial mampu melahirkan tatanan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing (Demirkiran & Gençer, 2017). Harapan ini menghadapi tantangan pengembangan dan pemanfaatan modal sosial dalam kelembagaan masyarakat. Menurut (Coleman, 1998) modal sosial mana yang masih potensial untuk dikembangkan dan modal sosial mana yang tengah mengalami krisis menjadi penting karena ternyata modal sosial bukan saja dapat mendukung proses pembangunan yang sedang berjalan, tapi juga dapat melemahkan proses pembangunan itu sendiri (Sujianto et al., 2019).

Berangkat dari sintesis data sekunder dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka mendesak untuk dilakukan penelitian komprehensif terkait dengan pengembangan dan pengelolaan perkebunan karet di Kabupaten Kuantan Singingi dengan menjadikan modal sosial sebagai fokus utamanya. Arahnya adalah untuk *supporting* terhadap program akselerasi pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera pada umumnya dan Provinsi Riau pada khususnya. Urgensi penelitian ini dilakukan berkaitan dengan daya tahan kelompok petani karet yang masih bertahan dalam usahanya pada masa stagnasi harga karet, tanpa lari kepekerjaan atau bidang perkebunan lain. Fokus penelitian ini pada masyarakat yang masih konsen pada usaha perkebunan karet secara swadaya dan membentuk kelompok atas dorongan modal sosial. *State of the art* penelitian dari penelitian terdahulu berkaitan dengan kelembagaan petani karet dilihat dari persepektif modal sosial. Pendekatan penelitian ini menggunakan naturalistik kualitatif secara empiris fakta dan fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Permasalahan penelitian ini dikaji lebih mendalam dengan fokus kepada petani karet yang mendorong daya tawar dalam penjualan hasil produksi karet. Berdasarkan latar belakang ini peneliti melakukan penelitian dengan pertanyaan masalah penelitian bagaimanakah modal sosial kelembagaan petani karet di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan fokus modal sosial petani perkebunan karet, dan kelembagaan yang menjadi solusi permasalahan kontekstual masyarakat perkebunan karet. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga tahun dari tahun 2016 sampai 2018 dengan lokasi penelitian di Kabupaten Kuantan Singingi. Subyek penelitian adalah masyarakat petani karet swadaya yang sudah masuk dalam kelembagaan petani karet.

Sumber Data Penelitian jenis sekunder merupakan dokumen yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintah, dan kelembagaan petani. Sedangkan data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada informan penelitian melalui wawancara langsung kepada kelompok petani dan pejabat dinas terkait yang membidang masalah perkebunan karet, pengamatan yang dilakukan oleh peneliti langsung dilapangan. Selain itu data primer juga didapat dari Focus Group Discussion (FGD) dengan *stakeholders* yang mengetahui permasalahan penelitian. Teknik pengambilan data yang dilakukan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, FGD.

Informan penelitian yaitu masyarakat di sekitar perkebunan karet di Kabupaten Kuantan Singingi, pihak *local government* dan kelembagaan lokal sosial kemasyarakatan (tokoh adat, kepenghuluan, tokoh agama, LSM, dan sebagainya). Data yang sudah diperoleh dilakukan proses triangulasi data guna mendapatkan data yang valid setelah itu dilakukan analisis data dengan menggunakan model analisis Interaktif (Miles & Huberman, 2012) yaitu melakukan kegiatan analisis dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Modal Sosial Kelembagaan Petani Karet ada beberapa alur pembentukan tindakan kolektif sehingga dapat dipahami unsur modal sosial yang terbentuk didalam tindakan kolektif tersebut. Unsur-unsur yang terlihat dalam membentuk tindakan kolektif tersebut adalah: (1) hubungan saling percaya (*trust*), yang meliputi adanya kejujuran dan toleransi oleh panitia sementara maupun oleh petani karet yang hasil karetnya akan dilelang, (2) pranata (*institutions*), meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama oleh petani karet, norma-norma dan sanksi-sanksi dan aturan yang dimiliki kelembagaan “lelang”, dan (3) jaringan sosial (*social networks*), meliputi adanya partisipasi, pertukaran timbal balik oleh petani karet dan toke, solidaritas dan kerjasama antar petani karet yang menginginkan kehidupan yang lebih baik.

Modal sosial kelembagaan petani karet berkaitan posisi tawar (*bargaining position*) petani terhadap para pedagang dalam hal menetapkan harga telah membuka wawasan komunitas petani karet di Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengorganisir diri dalam bentuk kerjasama kolektif dalam menjual komoditi karet yang mereka hasilkan dengan sistem “lelang”. Sistem penjualan tersebut telah diikuti oleh 35 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang terdiri dari gabungan kelompok tani yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan pada 2016 telah terjadi persaingan kelembagaan usaha yang dibentuk oleh toke yang meniru sistem penjualan yang dilakukan oleh KUB. Sehingga kemampuan komunitas mengorganisir diri dalam kegiatan kolektif seperti kasus penjualan karet secara kolektif menunjukkan bahwa pada komunitas tersebut telah terbangun pilar-pilar elemen modal sosial yang akan memperkuat posisi tawar komunitas terhadap kekuatan-kekuatan eksternal yang mencoba melakukan eksploitasi terhadap mereka.

Sebelum terbentuknya sistem kerjasama penjualan secara kolektif, terdapat sistem kerjasama kolektif dalam pengelolaan sumberdaya yaitu oleh masyarakat yang terletak di lima kecamatan yang rata-rata diikuti 10 orang perdesa di kecamatan yang melakukan sistem pelelangan. Kerjasama kolektif ini dikenal dengan “kelompok usaha bersama”. Kemudian pada tahun 2013 petani karet memiliki gagasan untuk mencoba menghimpun warga desa yang memiliki kebun karet agar mau menjualnya secara bersama-sama dengan melelangnya kepada

beberapa pedagang karet. Terdapat permasalahan dalam kegiatan penjualan karet secara kolektif yaitu: (1) kepercayaan yakni sebagian warga khawatir bahwa pengurus tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan jujur, (2) keterkaitan sebagian petani karet dengan pedagang karet (toke) disebabkan adanya hubungan hutang piutang antara petani karet dengan toke, (3) adanya hubungan kerabat dengan toke, baik karena hubungan daerah maupun hubungan perkawinan menyulitkan bagi si petani karet untuk menjual hasil produksi pada toke lain. Kepala Dinas perkebunan melakukan musyawarah dengan dengan gabungan kelompok tani perkebunan karet, didalam musyawarah tersebut dibahas mengenai permasalahan tersebut dan disepakati panitia sementara untuk mengelola sistem lelang tersebut. Kemudian dilakukan pemilihan kembali panitia setelah melakukan beberapa kali sistem lelang, penilaian tersebut sesungguhnya termasuk ke dalam unsur dari modal sosial. Pembentukan kerjasama kolektif tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang untuk dapat terwujud.

Penjualan karet sistem lelang mengakibatkan petani karet memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lebih kuat terhadap harga. Petani karet akan lebih mungkin untuk mendapatkan harga tertinggi, karena para toke juga akan berupaya untuk menawar dengan harga yang maksimal menurut perhitungannya. Dalam hasil penelitian disebutkan bahwa 100% responden menganggap penjualan karet dengan sistem lelang mampu meningkatkan penghasilan mereka bila dibandingkan dengan penjualan karet secara individual.

Temuan Penelitian dari hasil wawancara, FGD dan pengamatan peneliti menunjukkan bahwa modal sosial pengembangan kelembagaan pada masyarakat perkebunan karet di Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan identifikasi modal sosial dan permasalahan faktual di lapangan, modal sosial terbangun atas dasar ekonomi karena sikap dan pola pikir masyarakat perkebunan karet di Kuantan Singingi cenderung pragmatis. Pragmatisme tersebut makin kentara manakala terjadi fluktuasi harga karet yang terus menerus menurun.

Terkait dengan harga karet yang terus menerus turun, sesungguhnya bukan merupakan ranah kajian dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menghadirkan sebuah modal sosial pengembangan kelembagaan yang solutif dan aplikatif bagi masyarakat perkebunan karet baik dalam kondisi *ceteris paribus* (harga karet pada tingkat menengah – tinggi) maupun kondisi *non-ceteris paribus* (harga karet anjlok).

Kembali pada kondisi masyarakat yang pragmatis, harus diakui bahwa masyarakat perkebunan karet di Kuantan Singingi pada masa sekarang ini berada pada posisi yang terombang-ambing. Tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari mengharuskan mereka untuk berpikir dan berupaya keras untuk mempertahankan hidupnya, minimal memenuhi kebutuhan pokok/dasar (sandang, pangan, papan). Artinya, kondisi ekonomi yang tertinggal lahi-lagi menjadi fenomena umum yang dijumpai di lapangan. Oleh karenanya, tantangan dan tuntutan sebenarnya adalah bagaimana memfasilitasi masyarakat perkebunan karet tersebut untuk meraih tingkat kesejahteraan yang baik.

Modal sosial kelembagaan ini terbentuk akibat rendahnya posisi tawar (bargaining position) petani terhadap para pedagang dalam hal menetapkan harga dengan mengorganisir diri dalam bentuk kerjasama kolektif dalam menjual komoditi karet yang mereka hasilkan dengan sistem “lelang”. Sistem penjualan tersebut telah diikuti oleh 35 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang terdiri dari gabungan kelompok tani yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan pada 2016 telah terjadi persaingan kelembagaan usaha yang dibentuk oleh toke yang meniru sistem penjualan yang dilakukan oleh KUB. Sehingga kemampuan komunitas mengorganisir diri dalam kegiatan kolektif seperti kasus penjualan karet secara kolektif menunjukkan bahwa pada komunitas tersebut telah terbangun pilar-pilar elemen modal sosial yang akan memperkuat posisi tawar komunitas terhadap kekuatan-kekuatan eksternal yang mencoba melakukan eksploitasi terhadap mereka.

Sebelum terbentuknya sistem kerjasama penjualan secara kolektif ini menurut informan penelitian, terdapat sistem kerjasama kolektif dalam pengelolaan sumberdaya yaitu oleh masyarakat yang terletak di lima kecamatan yang rata-rata diikuti 10 orang perdesa di

kecamatan yang melakukan sistem pelelangan. Kerjasama kolektif ini dikenal dengan “kelompok usaha bersama”. Kemudian pada tahun 2013 petani karet memiliki gagasan untuk mencoba menghimpun warga desa yang memiliki kebun karet agar mau menjualnya secara bersama-sama dengan melelangnya kepada beberapa pedagang karet. Terdapat permasalahan dalam kegiatan penjualan karet secara kolektif yaitu: (1) kepercayaan yakni sebagian warga khawatir bahwa pengurus tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan jujur, (2) keterkaitan sebagian petani karet dengan pedagang karet (toke) disebabkan adanya hubungan hutang piutang antara petani karet dengan toke, (3) adanya hubungan kerabat dengan toke, baik karena hubungan daerah maupun hubungan perkawinan menyulitkan bagi si petani karet untuk menjual hasil produksi pada toke lain. Kepala Dinas perkebunan melakukan musyawarah dengan dengan gabungan kelompok tani perkebunan karet, didalam musyawarah tersebut dibahas mengenai permasalahan tersebut dan disepakati panitia sementara untuk mengelola sistem lelang tersebut. Kemudian dilakukan pemilihan kembali panitia setelah melakukan beberapa kali sistem lelang, penilaian tersebut sesungguhnya termasuk ke dalam unsur dari modal sosial. Pembentukan kerjasama kolektif tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang untuk dapat terwujud.

Penjualan karet sistem lelang mengakibatkan petani karet memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lebih kuat terhadap harga. Petani karet akan lebih mungkin untuk mendapatkan harga tertinggi, karena para toke juga akan berupaya untuk menawar dengan harga yang maksimal menurut perhitungannya. Dalam hasil penelitian disebutkan bahwa secara keseluruhan informan penelitian mengatakan bahwa KUB sangat mempengaruhi sistem kelembagaan usaha perkebunan karet di Kabupaten Kuantan Singingi atas dasar itu peneliti menemukan bahwa ini semua terjadi karena modal sosial kelembagaan dengan unsur kepercayaan, pranata dan networking.

2. Pembahasan

Modal Sosial merupakan tindakan kolektif yang berkaitan dengan hubungan saling percaya (*trust*), yang meliputi adanya kejujuran dan toleransi oleh panitia sementara maupun oleh petani karet yang hasil karetnya akan dilelang, dan hubungan pranata (*institutions*), meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama oleh petani karet, norma-norma dan sanksi-sanksi dan aturan yang dimiliki kelembagaan “lelang”, serta jaringan sosial (*social networks*), meliputi adanya partisipasi, pertukaran timbal balik oleh petani karet dan *toke*, solidaritas dan kerjasama antar petani karet yang menginginkan kehidupan yang lebih baik.

Modal sosial pada penelitian ini merujuk pada teori modal sosial (Coleman, James, 1988), (Putnam, 1995) dan (Woolcock & Narayan, 2000) yang diadopsi (Fine, 2007) dan (Sujianto et al., 2018) yang juga berpedoman pada teori modal sosial yang penekanan pada unsur *trust*, pranata, dan jaringan sosial dalam membangun model pembangunan ekonomi masyarakat yang berdaya saing. Ini menjadi menarik (Woolcock & Apr, 2007) dalam pembangunan ekonomi pada kelembagaan lokal yang potensial dengan harapan menurut (Anantanyu, 2011) dalam kelembagaan petani dibentuk dapat *Interorganizational Task, Resource Tasks, Includes Mobilizing Local Resources, Service Tasks*. Selain itu dengan adanya jaringan unsur modal sosial yang telah dijabarkan, memberikan manfaat dalam konteks terbentuknya kerjasama kolektif dalam pengelolaan penjualan komoditi karet.

Upaya menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership* atau *sense of belonging*) (Darmi, 2016), rasa memiliki bagian dari unsur modal sosial, dan temuan-temuan permasalahan di lokasi kajian sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini menemukan bahwa modal sosial pengembangan kelembagaan pada masyarakat perkebunan karet di Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan identifikasi modal sosial dan permasalahan faktual di lapangan, maka ditetapkan bahwa pengembangan kelembagaan yang paling solutif adalah pengembangan kelembagaan ekonomi. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sikap dan pola pikir masyarakat perkebunan karet di Kuantan Singingi cenderung pragmatis. Pragmatisme tersebut makin kentara manakala terjadi fluktuasi harga karet yang terus menerus menurun.

Terdapat permasalahan dalam kegiatan penjualan karet secara kolektif yaitu: (1) kepercayaan yakni sebagian warga khawatir bahwa pengurus tidak dapat menjalankan tugas

dengan baik dan jujur, (2) keterkaitan sebagian petani karet dengan pedagang karet (*toke*) disebabkan adanya hubungan hutang piutang antara petani karet dengan *toke*, (3) adanya hubungan kerabat dengan *toke*, baik karena hubungan daerah maupun hubungan perkawinan menyulitkan bagi si petani karet untuk menjual hasil produksi pada *toke* lain. Kepala Dinas perkebunan melakukan musyawarah dengan dengan gabungan kelompok tani perkebunan karet, didalam musyawarah tersebut dibahas mengenai permasalahan tersebut dan disepakati panitia sementara untuk mengelola sistem lelang tersebut. Kemudian dilakukan pemilihan kembali panitia setelah melakukan beberapa kali sistem lelang, penilaian tersebut sesungguhnya termasuk ke dalam unsur dari modal sosial. Pembentukan kerjasama kolektif tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang untuk dapat terwujud.

Penjualan karet sistem lelang mengakibatkan petani karet memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat terhadap harga. Petani karet akan lebih mungkin untuk mendapatkan harga tertinggi, karena para *toke* juga akan berupaya untuk menawar dengan harga yang maksimal menurut perhitungannya. Dalam hasil penelitian disebutkan bahwa secara keseluruhan informan penelitian mengatakan bahwa KUB sangat mempengaruhi sistem kelembagaan usaha perkebunan karet di Kabupaten Kuantan Singingi.

Simpulan

Modal sosial kelembagaan petani karet di Kabupaten Kuantan Singingi didorong oleh unsur kepercayaan, pranata dan *networking*. Modal sosial dalam pengembangan kelembagaan terbangun atas dasar desakan ekonomi karena sikap dan pola pikir masyarakat perkebunan karet di Kuantan Singingi cenderung pragmatis. Unsur-unsur yang terlihat dalam membentuk tindakan kolektif tersebut adalah: (1) hubungan saling percaya (*trust*), yang meliputi adanya kejujuran dan toleransi oleh panitia sementara maupun oleh petani karet yang hasil karetnya akan dilelang, (2) pranata (*institutions*), meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama oleh petani karet, norma-norma dan sanksi-sanksi dan aturan yang dimiliki kelembagaan “lelang”, dan (3) jaringan sosial (*social networks*), meliputi adanya partisipasi, pertukaran timbal balik oleh petani karet dan *toke*, solidaritas dan kerjasama antar petani karet yang menginginkan kehidupan yang lebih baik

Daftar Pustaka

- Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan Petani : Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. *Sepa: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 7(2), 102–109.
- Atmadja, A. T., Darmawan, N. A. S., & Herawati, N. T. (2016). Pengembangan Model Struktur Pengendalian Intern Berbasis Modal Sosial untuk Mencegah Kebrangkutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 783–793. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8281>
- Coleman, James, S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *The American Journal of Sociology*, 94(1988), 95–S120. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.22.6.723>.
- Coleman, J. S. (1998). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, 95–120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Darmi, T. (2016). Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial pada Sektor Pemerintahan Desa (Study pada Pengelolaan Dana Desa). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18(1), 21–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jantro.v18.n1.p21-27.2016>
- Demirkiran, C. Y., & Gençer, M. (2017). Impact of Social Capital on Career. *International Journal of Social Sciences ISSN*, 3(3), 580–600. <https://doi.org/10.20319/pijss.2017.33.580600>

- Fine, B. (2007). Social capital. *Development in Practice*, 17(4–5), 566–574. <https://doi.org/10.1080/09614520701469567>
- Hikmat, H. (2006). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora.
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (2012). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. In *Universitas Indonesia_UI Press*.
- Nasdian, F. T. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Obor.
- Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. *Culture and Politics: A Reader*, 42(25), 65–78. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-62397-6>
- Sujianto, S., Ikhsan, I., & Syofian, S. (2019). Strengthening Institutions in The Effort Adat Customary Law Enforcement in Illegal Gold Mining Areas Affected. *Jurnal Niara*, 12(1), 19–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/ni.v12i1.2284>
- Sujianto, S., Syofian, S., & Ikhsan, I. (2018). Model of economic development collaborative indigenous peoples (Akit) based on social capital in enhancing regional competitiveness. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 6(3), 61–65. <https://doi.org/10.18510/hssr.2018.639>
- Woolcock, M., & Apr, N. (2007). Social Capital and Economic Development : Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework Social capital and economic development : Toward a theoretical synthesis and policy framework. *Theory and Society*, 27(2), 151–208. <https://doi.org/10.2307/657866>
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social Capital: Implications for Development Theory, and Policy. *World Bank Research Observer*, 15, No. 2(August), 225–249. <https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225>